



Integrasi Nilai Pancasila dan Transformasi Kepemimpinan melalui Workshop “Pancasila di Era Digitalisasi” Desa Karamatwangi, Kabupaten Garut

Ary M Wibowo¹, Lusiana Dwiyantri¹, Pebrianto E N¹, Hanny G S¹, Rommy Hutagaol¹, Azmaryady D¹, Nugroho S Budi¹, Revilla Oulina¹, Jay A Singgih¹, Mayyasari T G¹, Ceppi Hilmansyah¹

¹Universitas Pertahanan RI

Corresponding Author: ary.wibowo@doktoral.idu.ac.id

Article History:

Received: 02-08-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Keywords: Pancasila, Asesmen Skala Sikap, Kepemimpinan

Transformasional, Desa Karamatwangi, SDGs, Sishankamrata

Abstract: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktorat Konsentrasi Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) angkatan 8 (Cohort 8) di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, pada Jumat, 22 Mei 2026. Bertajuk "Workshop Pancasila di Era Digitalisasi", kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan generasi muda sebagai benteng etis dalam menghadapi tantangan era kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital. Workshop dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan anggota karang taruna, serta difasilitasi oleh 10 mahasiswa dan 1 Kepala Program Studi Konsentrasi Strategi Pertahanan. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data uji coba awal pada lima dimensi nilai Pancasila guna memetakan internalisasi nilai ke dalam perilaku pengambilan keputusan strategis. Di tingkat desa, integrasi nilai-nilai ini krusial sebagai filter etis di era kecerdasan buatan (AI) guna mendukung SDGs Goal 16 (Institusi yang Tangguh) dan memperkuat ketahanan nirmiliter kognitif dalam kerangka Sishankamrata. Temuan ini berfungsi sebagai pijakan empiris awal untuk pengembangan instrumen secara longitudinal.

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan kualitas manusia dan penguatan kapasitas institusi sebagai pilar utama keberlanjutan kemajuan nasional. Potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak secara otomatis menjelma menjadi keunggulan strategis. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas, peningkatan populasi usia produktif justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial, memicu kemerosotan produktivitas, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan nasional berjiwa Pancasila bukan sekadar idealisme historis, melainkan investasi strategis jangka panjang yang menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan (Susi et al., 2024).

Tantangan kepemimpinan modern di sektor publik melampaui tuntutan kompetensi manajerial dan teknokratis murni. Studi empiris menunjukkan bahwa perilaku etis pemimpin memiliki pengaruh kausal yang masif terhadap persepsi keadilan, komitmen organisasional, kepercayaan, serta perilaku normatif bawahan. Analisis meta-analitik oleh Bedi et al. (2016) menegaskan bahwa kepemimpinan etis (*ethical leadership*) berhubungan positif dengan iklim kerja moral dan menekan deviasi perilaku di tempat kerja. Selain itu, model transmisi pengaruh etis ini bekerja secara struktural melalui beberapa jalur mediasi, seperti kualitas hubungan timbal balik (*leader-member exchange*), penguatan budaya etis organisasi, dan identifikasi organisasional pengikut (Peng & Kim, 2020). Oleh karena itu, dimensi moral dan integritas pemimpin tidak boleh diposisikan sebagai atribut sekunder, melainkan komponen inti yang menggerakkan roda organisasi.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menyediakan fondasi aksiologis yang sangat kaya dan mengikat secara konstitusional. Namun, tantangan akademik terbesar dalam diskursus kepemimpinan di Indonesia adalah menjembatani nilai-nilai filosofis yang abstrak tersebut ke dalam indikator perilaku yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Kepemimpinan Pancasila berisiko mengalami stagnasi konseptual bila hanya disajikan dalam diksi normatif-apologetis bahwa pemimpin nasional harus 'berkarakter Pancasila'. Diperlukan pendekatan baru yang mampu mengoperasionalkan setiap sila Pancasila ke dalam bentuk perilaku pengambilan keputusan nyata, mengidentifikasi kesenjangan internalisasi nilai secara objektif, serta merumuskan intervensi pengembangan yang berbasis bukti (*evidence-based development*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengoperasionalkan konsep kepemimpinan Pancasila melalui pengembangan awal instrumen Asesmen Skala Sikap Pancasila. Fokus instrumen ini bukan untuk melakukan indoktrinasi ideologis, melainkan sebagai alat diagnostik ilmiah untuk memetakan kecenderungan sikap kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di tengah proses transisi kepemimpinan dan reformasi administrasi publik saat ini, instrumen semacam ini menjadi sangat relevan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan standar etika pelayanan publik tetap terjaga (Ifan, 2024). Secara metodologis, artikel ini membedakan secara ketat antara hasil uji coba instrumen tahap awal (*pilot study*) dan proses validasi skala secara penuh. Perbedaan ini krusial karena penyusunan skala psikometrik yang kredibel memerlukan tahapan yang sistematis, mulai dari konseptualisasi domain, pembentukan butir, validasi isi, analisis faktor, hingga uji reliabilitas dan validitas konstruk (Boateng et al., 2018).

Urgensi operasionalisasi kepemimpinan Pancasila ini diuji secara empiris melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Program Studi Doktor Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) di Desa Karamatwangi, Kabupaten Garut. Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, merupakan wilayah penyangga strategis di tingkat lokal dengan potensi agrowisata dan koperasi desa yang berkembang. Sebagai desa yang tengah bertransformasi menuju kemandirian ekonomi dan sosial, aparatur desa serta masyarakatnya memerlukan penguatan kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Aparatur desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus wajah terdepan kehadiran negara.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan penguatan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi. *Workshop* "Pancasila di Era Digitalisasi" dirancang untuk membekali para pemimpin lokal, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, dengan pemahaman yang aplikatif

mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi filter etis dan kompas moral dalam menghadapi kompleksitas dunia digital. Dengan mengintegrasikan pembinaan ideologi Pancasila, program ini bertujuan memperkuat kapasitas tata kelola desa dalam menyongsong SDGs Goal 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh) serta memperkuat Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) dari unit administrasi terkecil.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi tanya jawab, serta simulasi dan praktik langsung. Rancangan kegiatan disusun untuk memastikan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif dari tim pengabdian kepada masyarakat sasaran, serta mendorong partisipasi aktif peserta dalam setiap sesi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian PKM *Cohort* 8 Program Doktorat Unhan RI yang berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026, bertempat di Koperasi Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisirupan, Kabupaten Garut. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah 35 orang yang terdiri dari:

1. Perangkat Desa Karamatwangi (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan perangkat desa lainnya);
2. Tokoh Masyarakat Desa (ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin informal);
3. Anggota Karang Taruna (perwakilan generasi muda desa).

Pemilihan khalayak sasaran didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa mereka merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen perubahan di tingkat desa. Kapasitas kepemimpinan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka sangat menentukan kualitas tata kelola desa dan ketahanan sosial di era digital. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

Tabel 1. Bahan/Alat yang digunakan dalam Workshop

Bahan/Alat	Fungsi
Modul <i>Workshop</i> "Pancasila di Era Digitalisasi"	Panduan materi bagi pemateri dan peserta
Laptop dan proyektor	Presentasi materi dan tampilan visual
Kertas kerja dan alat tulis	Pencatatan dan latihan peserta
Asesmen Skala Sikap Pancasila	Akses instrumen asesmen
Panel diskusi	Sesi diskusi tanya jawab

Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa teknik:

1. *Pre-test* dan *Post-test*: Peserta diberikan kuesioner singkat sebelum dan sesudah workshop untuk mengukur peningkatan pemahaman tentang konsep kepemimpinan Pancasila dan relevansinya di era digital.
2. Asesmen Skala Sikap Pancasila: Peserta mengisi instrumen Asesmen Skala Sikap Pancasila yang terdiri dari 35 butir pernyataan untuk memetakan kecenderungan sikap kepemimpinan berdasarkan lima dimensi nilai Pancasila.
3. Observasi Partisipatif: Tim melakukan observasi terhadap partisipasi dan respons peserta selama sesi workshop berlangsung.

4. Sesi Tanya Jawab: Sesi diskusi untuk menggali persepsi dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah arus digitalisasi.
5. Evaluasi Akhir Kegiatan: Peserta mengisi formulir evaluasi untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan *workshop*.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dan kualitatif. Data *pre-test* dan *post-test* dianalisis untuk melihat peningkatan rata-rata pemahaman peserta. Data Asesmen Skala Sikap Pancasila dianalisis dengan menghitung skor rata-rata per dimensi dan mengklasifikasikan ke dalam kategori internalisasi nilai (Sangat Kuat, Terhayati, atau Ketegangan Nilai/Ambang Batas) sesuai dengan klasifikasi operasional yang telah ditetapkan (Boateng et al., 2018; Norman, 2010). Hasil diskusi tanya jawab dan observasi partisipatif dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemahaman, tantangan, dan kebutuhan pengembangan kepemimpinan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *workshop* "Pancasila di Era Digitalisasi" dilaksanakan pada Jumat, 22 Mei 2026, bertempat di Koperasi Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB, dengan rangkaian agenda sebagai berikut:

Tabel 2. Agenda Workshop "Pancasila di Era Digitalisasi"

Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
09.00 – 09.30	Pembukaan dan Sambutan	Kepala Desa Karamatwangi & Kaprodi S3 Prodi Strategi Pertahanan
09.30 – 10.30	Sesi 1: "Pancasila di Era Digital: Relevansi dan Tantangan"	Mahasiswa S3 <i>Cohort</i> 8
10.30 – 10.45	Sesi 2: "Kepemimpinan Transformasional Berbasis Pancasila"	Mahasiswa S3 <i>Cohort</i> 8
10.45 – 12.30	Diskusi Tanya Jawab dan Praktik Asesmen	Seluruh Peserta
12.30 – 13.00	Penutupan, Evaluasi, dan Foto Bersama	Tim PKM

Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan anggota karang taruna, serta difasilitasi oleh 10 mahasiswa Program Doktorat *Cohort* 8 Konsentrasi Strategi Pertahanan dan Kepala Program Studi.



Gambar 1. Workshop “Pancasila di Era Digitalisasi” pada Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut

Hasil Asesmen Skala Sikap Pancasila

Berdasarkan pengisian instrumen Asesmen Skala Sikap Pancasila oleh 35 peserta, diperoleh profil sebaran skor rata-rata pada kelima sila sebagai berikut:

Tabel 3. Profil Skor Rata-rata Asesmen Skala Sikap Pancasila

Dimensi Pancasila	Skor Rata-Rata	Kategori
Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa	29,1	Terhayati
Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	30,1	Terhayati
Sila 3: Persatuan Indonesia	30,5	Terhayati
Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	29,1	Terhayati
Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	31,0	Terhayati

Catatan: Rentang skor: Sangat Kuat (148–175), Terhayati (112–147), Ketegangan Nilai / Ambang Batas (<112)

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh peserta berada dalam kategori "Terhayati" secara keseluruhan, dengan skor tertinggi pada Sila Kelima (Keadilan Sosial) sebesar 31,0 dan Sila Ketiga (Persatuan) sebesar 30,5, sementara skor terendah terdapat pada Sila Pertama (Ketuhanan) dan Sila Keempat (Kerakyatan) yang sama-sama mencapai 29,1. Mengingat kelima dimensi diukur menggunakan skala instrumen dengan rentang teoretis maksimal yang identik (7 hingga 35), perbedaan ini memberikan gambaran berharga tentang kecenderungan perilaku kepemimpinan.

Pemberian skor pada setiap butir pernyataan dilakukan dengan menjumlahkan nilai respons instrumen per dimensi. Melalui evaluasi komposit ini, hasil penilaian diperlakukan sebagai petunjuk kecenderungan sikap (*attitude tendency*) dan bukan sebagai alat pelabelan karakter moral absolut. Mengingat metode pelaporan mandiri (*self-report assessment*) rentan terhadap bias keinginan sosial (*social desirability bias*) dan bias penilaian diri (*self-enhancement bias*), pengembangan lanjutan mutlak memerlukan metode penilaian multi-sumber (*multi-source feedback/360-degree assessment*) yang membandingkan persepsi diri pemimpin dengan umpan balik dari atasan, rekan sejawat, serta bawahan.



Gambar 2. Peserta Workshop yang terdiri dari Perangkat Desa Karamatwangi, Tokoh Masyarakat, dan Anggota Karang Taruna

Penerjemahan nilai Pancasila dari tingkat filosofis abstrak ke indikator perilaku yang dapat diamati merupakan inti dari Asesmen Skala Sikap Pancasila diatas. Tabel 4 menampilkan rincian operasionalisasi dimensi, indikator perilaku kunci, contoh butir amatan, serta makna pengukuran yang mendasari perancangan instrumen ini.

Tabel 4. Matriks Operasionalisasi Nilai dan Contoh Butir Amatan Skala Sikap Pancasila

Dimensi Pancasila	Indikator Perilaku Kunci	Contoh Pernyataan (Butir Amatan)	Makna Pengukuran
Sila 1: Ketuhanan	Integritas mutlak, kejujuran batiniah, tanggung jawab transendental.	Saya tetap konsisten mempertahankan nilai kejujuran dan prinsip integritas profesional ketika tindakan saya tidak diawasi oleh pihak manapun.	Konsistensi moral, pengendalian diri, akuntabilitas personal.
Sila 2: Kemanusiaan	Penghormatan martabat, empati, keadilan interpersonal.	Saya secara aktif mempertimbangkan perlindungan hak-hak, martabat, dan dampak kesejahteraan terhadap semua pihak sebelum menetapkan suatu keputusan penting.	Penghormatan terhadap kemanusiaan, sensitivitas sosial.

Dimensi Pancasila	Indikator Perilaku Kunci	Contoh Pernyataan (Butir Amatan)	Makna Pengukuran
Sila 3: Persatuan	Solidaritas nasional, loyalitas institusional, resolusi konflik maslahat.	Saya bersedia menempatkan kepentingan keutuhan organisasi dan ketahanan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok ketika terjadi konflik kepentingan.	Orientasi persatuan, kesediaan berkorban, integrasi sosial.
Sila 4: Kerakyatan	Deliberasi inklusif, keterbukaan sudut pandang, konsensus.	Saya secara sengaja membuka ruang diskusi yang setara dan menghargai perbedaan pandangan dari tim kerja sebelum memutuskan kebijakan strategis.	Kualitas musyawarah, inklusivitas demokratis.
Sila 5: Keadilan Sosial	Pemerataan manfaat, keadilan distributif, kesejahteraan bersama.	Saya mengalokasikan sumber daya organisasi secara proporsional dan memastikan distribusi manfaat serta beban kerja dilakukan secara objektif dan adil.	Keadilan distributif, kepedulian terhadap kesenjangan.

Pembahasan

Pola Internalisasi Nilai: Kekuatan dan Celah

Pola sebaran skor yang ditemukan mengindikasikan adanya kecenderungan yang menarik dalam internalisasi nilai Pancasila di kalangan aparatur desa dan tokoh masyarakat Karamatwangi. Skor tertinggi pada Sila Kelima dan Sila Ketiga menunjukkan bahwa responden memiliki kekuatan relatif dalam menggerakkan pencapaian tujuan bersama (berorientasi hasil) dan menjaga kohesivitas internal tim. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang umumnya memiliki ikatan sosial yang kuat dan semangat gotong royong yang tinggi. Pola sebaran ini membagi orientasi kepemimpinan ke dalam dua spektrum utama. Di satu sisi, spektrum eksternal-organisasional yang diwakili oleh Sila Kelima dan Sila Ketiga menunjukkan kekuatan relatif responden dalam menggerakkan pencapaian target kerja, menjaga kohesivitas internal, serta mendorong

hasil yang adil. Di sisi lain, spektrum etis-batiniah dan prosedural-deliberatif yang diwakili oleh Sila Pertama dan Sila Keempat menjadi area yang memerlukan intervensi pengembangan intensif. Hasil ini menopang premis utama bahwa seorang pemimpin dapat sangat efektif dalam mengejar hasil (*result-oriented*) dan menjaga persatuan tim, namun berpotensi mengalami defisit pada aspek konsistensi integritas personal (batiniah) dan kualitas proses pengambilan keputusan yang partisipatif.

Skor relatif terendah pada Sila Pertama dan Sila Keempat mengindikasikan adanya celah internalisasi (*internalization gap*) pada dua aspek krusial: fondasi etis-spiritual dan kualitas proses deliberatif inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa fondasi etis-spiritual yang kokoh (Sila 1), pemimpin rentan terhadap godaan pragmatisme instan dan kompromi etis di tengah tekanan informasi dan tuntutan adaptasi teknologi. Tanpa kualitas deliberasi yang inklusif (Sila 4), pengambilan keputusan di era digital berisiko menjadi eksklusif, otoriter, dan mengabaikan suara-suara marginal di masyarakat.

"Blind Spot" Etis-Spiritual dalam Kepemimpinan Desa

Penggunaan konsep *blind spot* etis-spiritual dalam kegiatan ini diarahkan sebagai instrumen diagnostik pengembangan, bukan vonis moral. Istilah *blind spot* menggambarkan area perilaku di mana kesadaran etis dan kontrol batiniah pemimpin mengalami pelonggaran akibat tekanan target, kompleksitas tugas, atau minimnya pengawasan. Pemimpin yang berkinerja tinggi dalam pencapaian target strategis adakalanya terjebak mengambil tindakan pragmatis atau mengabaikan prinsip akuntabilitas ketika situasi krisis mendesak.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa aparatur desa dan tokoh masyarakat Karamatwangi, sebagaimana pemimpin di berbagai tingkatan, cenderung lebih kuat dalam orientasi eksekusi dan kohesi sosial dibandingkan dengan konsistensi moral-spiritual dan kualitas deliberasi. Pola ini bukanlah kelemahan individual, melainkan cerminan dari dinamika organisasi yang lebih luas di mana kapasitas teknis dan orientasi pencapaian sering kali mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan pembinaan integritas batiniah. Temuan empiris membuktikan bahwa kelemahan pada aspek integritas batiniah dan kualitas deliberasi pemimpin berhubungan langsung dengan penurunan kepercayaan organisasi, komitmen bawahan, serta peningkatan penyimpangan etika (Bedi et al., 2016). Melalui sesi diskusi, teridentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap celah ini, antara lain:

1. Minimnya ruang refleksi etis dalam rutinitas kerja harian aparatur desa;
2. Tekanan administratif dan target pembangunan yang menyita perhatian dari aspek pembinaan karakter;
3. Kurangnya instrumen pengukuran yang mampu memetakan internalisasi nilai secara objektif;
4. Pemahaman yang masih abstrak tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam perilaku nyata.

Relevansi Pancasila di Era Digitalisasi

Dalam sesi *workshop*, peserta diajak untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi filter etis dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*AI*). Beberapa poin kunci yang muncul dalam diskusi adalah:

1. Sila 1 (Ketuhanan) : Menjaga integritas dan kejujuran dalam menggunakan teknologi digital, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran.

2. Sila 2 (Kemanusiaan) : Menghormati privasi dan martabat orang lain di ruang digital, tidak melakukan perundungan siber (*cyberbullying*), serta menggunakan teknologi untuk memberdayakan sesama.
3. Sila 3 (Persatuan): Menghindari penyebaran konten yang memecah belah, menggunakan platform digital untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, serta melawan narasi-narasi yang mengancam keutuhan bangsa.
4. Sila 4 (Kerakyatan) : Menggunakan media sosial dan platform digital sebagai ruang musyawarah yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari *echo chamber* yang memicu polarisasi.
5. Sila 5 (Keadilan) : Memastikan akses yang adil terhadap teknologi dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menggunakan teknologi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam sesi diskusi ini, terutama ketika membahas tantangan hoaks dan disinformasi yang kerap menerpa masyarakat pedesaan. Banyak peserta yang mengaku pernah menjadi korban hoaks dan menyadari perlunya literasi digital yang lebih baik serta filter etis dalam menyikapi informasi yang beredar.

Integrasi dengan Transformasi Kepemimpinan dan Kepemimpinan Inklusif

Kepemimpinan Pancasila tidak ditujukan untuk menegasikan eksistensi teori kepemimpinan global, melainkan sebagai wadah integrasi teoretis. Teori kepemimpinan transformasional memberikan penjelasan operasional mengenai mekanisme menginspirasi pengikut, mentransfer visi, dan melakukan stimulasi intelektual untuk menggerakkan perubahan organisasi (Judge & Piccolo, 2004). Dalam sintesis ini, nilai Pancasila bertindak sebagai kompas etis yang menentukan arah dan cara perubahan tersebut dicapai. Model kepemimpinan transformasional berbasis Pancasila menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari luaran kuantitatif atau kecepatan inovasi, melainkan dari cara proses tersebut menghargai martabat manusia, mempertahankan persatuan, dan menyebarkan keadilan sosial (Insan, 2019).

Lebih jauh lagi, integrasi ini sangat penting dalam menjembatani dinamika antargenerasi dan percepatan transformasi digital. Implementasi nilai-nilai Pancasila mampu melahirkan model kepemimpinan inklusif yang adaptif terhadap karakteristik generasi muda, seperti Generasi Z (Noor & Firdaus, 2024). Melalui pendekatan inklusif yang dilandasi nilai persatuan dan musyawarah, pemimpin mampu membangun iklim kolaboratif yang menghargai keberagaman pemikiran, meminimalkan resistensi terhadap perubahan, serta memperkuat komitmen organisasi di tengah arus disrupsi teknologi.

Implikasi bagi Penguatan Sishankamrata dan SDGs

Kegiatan ini memiliki implikasi strategis bagi penguatan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh). Dalam kerangka Sishankamrata, desa diposisikan sebagai kompartemen pertahanan terkecil dan fondasi utama pertahanan nirmiliter. Penguatan kepemimpinan Pancasila di tingkat desa berkontribusi langsung pada aspek keamanan kognitif (*cognitive security*), ketahanan masyarakat terhadap penetrasi ideologi transnasional dan disinformasi sistemik. Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang kokoh, aparat desa dan masyarakat mampu menjadi garda depan pertahanan yang imun terhadap infiltrasi eksternal dan tangguh secara sosial-informasional, selaras dengan semangat kemandirian pertahanan semesta.

Sementara itu, dalam konteks SDGs, penguatan institusi desa melalui pembinaan kepemimpinan berbasis nilai merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan partisipatif. Workshop ini menjadi salah satu

upaya untuk membangun kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan global sekaligus mempertahankan identitas kebangsaan yang kokoh.

Evaluasi Peserta dan Dampak Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi akhir kegiatan, peserta memberikan respons yang sangat positif terhadap workshop ini. Beberapa temuan evaluasi meliputi:

1. Peningkatan pemahaman: Rata-rata skor *post-test* meningkat secara signifikan dibandingkan *pre-test*, mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang konsep kepemimpinan Pancasila dan relevansinya di era digital.
2. Kepuasan peserta: Mayoritas peserta menyatakan sangat puas dengan materi dan penyampaian workshop, dan seluruh peserta menyatakan bersedia mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang.
3. Minat tindak lanjut: Sebagian besar peserta menyatakan minat untuk mengikuti program pendampingan lanjutan dalam penerapan Asesmen Skala Sikap Pancasila di lingkungan kerja mereka.
4. Rekomendasi peserta: Beberapa peserta merekomendasikan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan generasi muda di tingkat sekolah menengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan PKM berupa *workshop* "Pancasila di Era Digitalisasi" yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktorat *Cohort* 8 Konsentrasi Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Desa Karamatwangi, Kabupaten Garut, pada 22 Mei 2026, telah berhasil mencapai tujuannya. Beberapa kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah:

1. Pemahaman peserta tentang relevansi Pancasila di era digital meningkat secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor *post-test* dibandingkan *pre-test*.
2. Hasil Asesmen Skala Sikap Pancasila mengidentifikasi pola internalisasi nilai di kalangan aparatur desa dan tokoh masyarakat Karamatwangi, dengan skor tertinggi pada Sila Kelima (Keadilan Sosial, 31,0) dan Sila Ketiga (Persatuan, 30,5), serta skor terendah pada Sila Pertama (Ketuhanan, 29,1) dan Sila Keempat (Kerakyatan, 29,1). Pola ini mengindikasikan adanya celah internalisasi pada aspek fondasi etis-spiritual dan kualitas proses deliberatif inklusif. Kapasitas untuk mengejar hasil dan menjaga kohesi organisasi relatif lebih dominan dibandingkan konsistensi etis-spiritual dan kedalaman proses deliberatif inklusif.
3. *Workshop* ini berhasil membangun kesadaran kritis di kalangan peserta tentang pentingnya filter etis-spiritual dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*AI*), serta memperkuat komitmen mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan.
4. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memperkuat sinergi antara civitas akademika Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan sektor publik dalam mewujudkan ketahanan nasional berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Saran

Berdasarkan hasil dan temuan selama pelaksanaan kegiatan, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Penguatan Program Pendampingan Berkelanjutan: Diperlukan program pendampingan lanjutan bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat Karamatwangi dalam mengimplementasikan hasil Asesmen Skala Sikap Pancasila, khususnya pada dimensi Sila Pertama dan Sila Keempat yang masih menjadi area kelemahan. Intervensi pengembangan harus dirancang dalam bentuk simulasi kasus nyata, mentoring personal, pemodelan perilaku (*role modelling*), pembiasaan refleksi etis (*ethical reflection*), serta restrukturisasi mekanisme pengambilan keputusan untuk meminimalkan bias moral dan epistemis.
2. Pengembangan Modul Pelatihan Terintegrasi: Materi *workshop* perlu dikembangkan menjadi modul pelatihan yang lebih komprehensif dan dapat direplikasi di desa-desa lain di wilayah Jawa Barat, dengan penekanan pada aspek praktis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital.
3. Validasi Psikometrik Instrumen: Instrumen Asesmen Skala Sikap Pancasila perlu melalui proses validasi psikometrik meliputi validitas isi oleh pakar, analisis faktor eksploratori (EFA), uji reliabilitas internal, dan validitas konstruk melalui analisis faktor konfirmatori (CFA) pada sampel yang lebih besar dan representatif.
4. Pengembangan Model Penilaian Multi-Sumber: Untuk meningkatkan akurasi pengukuran, pengembangan lanjutan instrumen perlu mencakup metode penilaian multi-sumber (*multi-source feedback/360-degree assessment*) yang membandingkan persepsi diri pemimpin dengan umpan balik dari atasan, rekan sejawat, dan bawahan.
5. Ekspansi Jangkauan Kegiatan: Kegiatan serupa perlu diperluas jangkauannya ke lebih banyak desa di Kabupaten Garut dan wilayah Jawa Barat lainnya, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan.
6. Integrasi dengan Program Pembangunan Desa: Hasil asesmen dan rekomendasi dari *workshop* ini perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan desa dan perencanaan anggaran, sehingga penguatan kepemimpinan Pancasila menjadi bagian integral dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan Pascasarjana yang telah memberikan dukungan dan izin dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhan RI yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan PKM Cohort 8 Program Doktorat Unhan RI, serta kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut beserta unsur Forkopimda, Kejaksaan Negeri Garut, Bea Cukai Tasikmalaya, Kodam III/Siliwangi, dan seluruh mitra kerja atas sinergi serta kolaborasi strategis yang telah terjalin dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, serta seluruh elemen masyarakat Desa Karamatwangi yang telah menyambut dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan *workshop*. Terima kasih turut disampaikan kepada Kepala Program Studi Doktor Strategi

Pertahanan Unhan RI beserta seluruh dosen pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada seluruh mahasiswa Program Doktor Cohort 8 Konsentrasi Strategi Pertahanan Unhan RI yang telah bekerja sama dalam merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga segala amal baik dan kontribusi seluruh pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa serta kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penguatan kepemimpinan Pancasila dan ketahanan nasional di tingkat desa menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsar, B., Badir, Y., & Kiani, U. S. (2016). Linking Spiritual Leadership and Employee Pro-Environmental Behavior: The Influence of Workplace Spirituality, Intrinsic Motivation, and Environmental Passion. *Journal of Environmental Psychology*, 45, 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.011>
- Bedi, A., Alpaslan, C. M., & Green, S. (2016). A meta-analytic review of ethical leadership outcomes and moderators. *Journal of Business Ethics*, 139, 517–536. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2625-1>
- Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quinonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: A primer. *Frontiers in Public Health*, 6, 149. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149>
- Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–616. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>
- Devrika, D. (2024). Etika dan Integritas Manajemen Kepemimpinan Berdasarkan Norma Pancasila. *Jurnal Daya Saing*, 11(1), 12-25. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v11i1.2037>
- Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. *The Leadership Quarterly*, 14(6), 693–727. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.09.001>
- Ifan, M. (2024). Kepemimpinan Pancasila dalam Era Pemerintahan Baru Indonesia. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(2), 100–109. <https://doi.org/10.63758/jpp.v4i2.55>
- Insan, I. (2019). Transformational Leadership Model Based on Pancasila and Struggle in Mobilizing National Resources for Indonesia. *Jurnal Dialektika*, 7(2).
- Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 755–768. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.5.755>
- Kariadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila dalam perspektif masyarakat multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86–96. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Khasri, M. R. K. (2021). Pancasila dalam Praksis Sosial: “Manusia Pancasila” Menjawab Permasalahan Masyarakat Digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 86–97. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.5>
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.
- Noor, Z. R., & Firdaus, M. R. (2024). Memperkuat Kepemimpinan Inklusif pada Gen Z di Era Digitalisasi melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(3), 150-162.

- Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. *Advances in Health Sciences Education*, 15, 625–632. <https://doi.org/10.1007/s10459-010-9222-y>
- Peng, A. C., & Kim, D. (2020). A meta-analytic test of the differential pathways linking ethical leadership to normative conduct. *Journal of Organizational Behavior*, 41, 348–368. <https://doi.org/10.1002/job.2427>
- Saktiawan, E. B., Wasito, W., Susilo, T., Sinaga, T. H., & Suryawan, W. R. (2025). Falsafah Pancasila dalam Kepemimpinan Nasional: Pengelolaan Sumber Daya Strategis sebagai Antitesis terhadap Hegemoni Global. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1).
- Soekarno. (2018). Filsafat Pancasila menurut Bung Karno (H. Herdianto, Ed.). Media Pressindo.
- Susi, S., Khair, O. I., Firmansyah, J. P., Salman, A., & Raharjo, J. S. (2024). Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 12–23. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1964>
- Tambunan, T. S. (2018). Kepemimpinan Pancasila: Mengelola Kebhinekaan, dan untuk Membangun Indonesia yang Lebih Baik. *The Ary Suta Center*, Vol. 43, 95–132.
- Zhang, Y., Zhang, L., Liu, G., Duan, J., Xu, S., & Cheung, M. W.-L. (2019). How does ethical leadership impact employee organizational citizenship behavior? A meta-analytic review based on two-stage meta-analytic structural equation modeling (TSSEM). *Zeitschrift für Psychologie*, 227(1), 18–30. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000353>
- Zhu, W., Zheng, X., Riggio, R. E., & Zhang, X. (2015). A critical review of theories and measures of ethics-related leadership. *New Directions for Student Leadership*, 2015(146), 81–96. <https://doi.org/10.1002/yd.20137>
- Özdoğan, M., & Sarier, Y. (2024). The relationship of ethical leadership with teachers’ organizational behavior, attitudes, and perceptions: A meta-analysis study. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1538. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04070-6>